

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian Wilayah Pesisir berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, " Wilayah Pesisir ialah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat Wilayah Pesisir meliputi baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut mencakup bagian laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran".

Wilayah Pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya laut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Kekayaan sumberdaya pesisir, meliputi pulau-pulau besar dan kecil, yang dikelilingi ekosistem pesisir tropis, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya.

Namun, karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan masih berorientasi daratan, akhirnya menjadikan laut sebagai kolam sampah raksasa.

Beberapa peranan dari Wilayah Pesisir, yaitu bahwa Wilayah Pesisir merupakan tempat bertemunya pendatang dari berbagai daerah, Wilayah Pesisir menjadi mozaik sosial dan budaya, Ekosistem yang paling beragam, rumit dan produktif sebagian besar terletak di Wilayah Pesisir. Sangat penting peranannya dalam menjamin pengadaan pangan dunia, menumbuhkan dan menjaga keunikan sosial, budaya dan ekologi serta negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang memiliki sumberdaya yang sangat terbatas merupakan contoh dari cara hidup dalam lingkungan yang terbatas tetapi terbuka terhadap globalisasi. (<http://bandarlampungkota.go.id>)

Salah satu wilayah yang memiliki potensi area pesisir yang cukup baik adalah area pesisir Bandar Lampung dimana Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung memiliki luas sekitar 0,05% atau sekitar 27 km dari luas keseluruhan Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung berada pada Teluk Lampung, selatan Pulau Sumatera. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5° 20' - 5° 30' Lintang Selatan dan 105° 28' - 105° 37' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Bandar Lampung adalah 192,18 km² dengan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah 790.895 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 41 jiwa/km². (<http://bandarlampungkota.go.id>)

Cakupan lokasi yang menjadi objek penataan pesisir dibatasi pada kelurahan-kelurahan yang termasuk Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung, terdiri dari dua belas Kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Panjang, Telukbetung Selatan dan Telukbetung Barat. Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Panjang adalah: Srengsem, Panjang Selatan, Panjang Utara, dan Karang Maritim. Kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Telukbetung Selatan adalah: Pesawahan, Kangkung, Bumiwaras, Way Lunik, dan Sukaraja. Sedangkan kelurahan yang termasuk dalam Kecamatan Telukbetung Barat adalah: Sukamaju, Keteguhan dan Kota Karang. (<http://bandarlampungkota.go.id>)

Pesatnya pertumbuhan penduduk seiring dengan perkembangan pembangunan secara langsung akan mempengaruhi kondisi dan keadaan Wilayah Pesisir. Apabila pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan tersebut tidak memperhatikan tataruang kota serta adanya pengelolaan lingkungan yang lemah, maka dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial seperti munculnya *Slum Areas* (daerah kumuh), yang ditunjukkan dengan buruknya keadaan lingkungan, kurangnya fasilitas sosial dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya.

Selain itu pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan sebagai jumlah terbesar merupakan kelompok profesi paling miskin di Indonesia. Sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat pesisir yang berdampak pada pandangan masyarakat terhadap penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung.

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Yang berdampak pada pemanfaatan Wilayah Pesisir yang cenderung kurang terarah.

Pratikto (2005) mengemukakan fenomena yang terjadi pada masyarakat pesisir disebabkan oleh tiga hal yaitu;

- a) Kemiskinan struktural, berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor luar (ekternal) seperti sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan insentif, fasilitas pembangunan dan teknologi;
- b) Kemiskinan super-struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan makro yang tidak pro pembangunan masyarakat pesisir seperti kebijakan pemerintahan yang berupa proyek dan program pembangunan;
- c) Kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan yang berkaitan dengan keadaan yang melekat pada masyarakat pesisir seperti gaya hidup, tingkat pendidikan, budaya, adat, serta kepercayaan.

Oleh karena itu guna mengatasi permasalahan yang terjadi di Wilayah Pesisir diperlukan adanya penataan Wilayah Pesisir yang terencana guna memaksimalkan potensi kekayaan pesisir demi kesejahteraan masyarakat dan keselarasan lingkungan. Peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan guna terwujudnya pengelolaan pesisir yang lebih terencana.

Penataan Wilayah Pesisir merupakan suatu upaya perubahan yang dilandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah). Interpretasi Marx dan Engels mengemukakan bahwa perubahan harus dicari dalam aspek ekonomi ketimbang didalam filsafat. Pemahaman historis hanya diperoleh melalui analisis struktural. Upaya untuk memperoleh pemahaman dalam mempelajari pemikiran-pemikiran manusia akan selalu menghasilkan kegagalan.

Bukan cara manusia berfikir, juga bukan apa yang dipikirkan manusia dalam membentuk sejarah, cara mereka berhubungan dalam proses produksi dan cara hubungan mereka dengan produksilah yang membentuk sejarah.

Setiap masyarakat ditandai oleh suatu infrastruktur yaitu struktur ekonomi, dan suprastruktur yang terdiri dari ideologi, hukum, pemerintahan, keluarga, dan agama. Suprastruktur muncul dari infrastruktur, artinya basis materil (ekonomi) masyarakat adalah landasan tempat membangun semua basis kehidupan lainnya, dengan demikian perubahan cara produksi menyebabkan perubahan di dalam seluruh hubungan (Lauer, 2003).

Apabila kita melihat tujuan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015 adalah :

“Untuk menciptakan tata ruang kawasan perkotaan dalam suatu blok-blok peruntukkan (*Blicking system*) melalui perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan ditinjau dari aspek fungsional, social, ekonomi dan lingkungan termasuk ekologi dan visualnya”.

Penataan Wilayah Pesisir Bandar Lampung secara langsung akan berdampak kepada keberadaan masyarakat yang berada di Wilayah Pesisir. Adapun pengelolaan dampak sosial tersebut, antara lain:

- a) Mengelola dampak sosial negatif/positif, yang diprediksi terjadi pada saat/setelah penataan ruang pesisir;
- b) Sebagai bagian dari *social safeguard* (pengamanan sosial);
- c) Melakukan langkah-langkah kongkrit dan skenario kebijakan sosial ekonomi yang berpihak pada masyarakat;

- d) Menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat;
- e) Mengembangkan potensi sosial ekonomi yang tumbuh di masyarakat;
- f) Melakukan pendekatan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung.

Dengan melihat proses pengelolaan Wilayah Pesisir selama ini yang menimbulkan berbagai macam permasalahan pada masyarakat pesisir, maka permasalahan yang menjadi penting dalam penelitian ini ialah proses pengelolaan lingkungan membutuhkan suatu adanya perencanaan yang terpadu serta pada proses tersebut akan muncul berbagai kriteria-kriteria yang diharapkan akan mengoptimalkan potensi yang terkandung pada Wilayah Pesisir sehingga masyarakat pesisir dapat menikmati kekayaan yang terkandung di Wilayah Pesisir. Proses pengelolaan tersebut tentu merujuk pada adanya suatu perencanaan penataan ruang pada Wilayah Pesisir dan sejauh mana masyarakat pesisir memahami potensi yang terkandung dalam Wilayah Pesisir.

Guna menghindari adanya Pro dan Kontra yang terjadi akibat dari konsekuensi pembangunan, secara konkret dalam Undang-undang No.25 tahun 1994 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan surat edaran Mendagri No.50/1987/tertanggal 5 Mei 2003 tentang pedoman penyelenggaraan koordinasi pembangunan partisipatif, memberikan amanat kepada seluruh pemerintah daerah untuk melaksanakan pola pembangunan partisipatif. Pelaksanaan pembangunan partisipatif diharapkan dapat mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat tentang kepentingan dan kebutuhan mereka dalam program pembangunan daerah.

Pemikiran inilah yang turut mendukung penulis memilih masyarakat pesisir sebagai bagian dari obyek penelitian ini. Mengingat kompleksnya masalah yang terjadi di Wilayah Pesisir Bandar Lampung, maka permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini di fokuskan pada permasalahan yang terjadi di Wilayah Pesisir Bandar Lampung sehingga diperlukan adanya solusi/upaya bersama dalam mengoptimalkan potensi Wilayah Pesisir Bandar Lampung.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana permasalahan yang terjadi di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana persepsi masyarakat yang Pro dan Kontra terhadap penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung;
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat yang Pro dan Kontra terhadap penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan:

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada mata kuliah Sosiologi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah;
2. Secara akademis nantinya dijadikan bahan pertimbangan bagi proses penelitian selanjutnya;
3. Secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk menangani masalah pembangunan bagi pemerintah Kota Bandar Lampung.